

Laporan Kinerja
KPKNL Surabaya

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

2023



KEMENTERIAN KEU
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Surabaya pada Tahun 2023.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Surabaya telah menerapkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrument dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Surabaya dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Surabaya dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2023. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Tahun 2023 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023 diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Surabaya Tahun 2023 sebesar 112,72%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Surabaya sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surabaya Tahun 2023.

Dengan telah tersusunnya LAKIN KPKNL Surabaya ini, kami harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan terhadap upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Surabaya. Tuntutan kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan pelaksanaan lelang harus dapat dijawab dengan perbaikan terus menerus dengan dilandasi Nilai-Nilai Organisasi yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

Kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPKNL Surabaya kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Surabaya, Februari 2023

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Siti Badriyah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain itu, laporan kinerja KPKNL Surabaya merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

Laporan kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Mencermati tuntutan perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang terus membenahi diri secara menyeluruh melalui perubahan dengan pendekatan fungsi, maka KPKNL Surabaya dituntut untuk secara aktif segera menyesuaikan diri agar dapat memenuhi tuntutan yang ada di masyarakat. Langkah konkrit yang diambil oleh KPKNL Surabaya tertuang dalam perencanaan strategis yang memuat visi, misi, nilai, dan renstra. Hal ini dimaksudkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis, terprogram dan berkesinambungan.

Agar KPKNL Surabaya dapat memenuhi harapan para *stakeholder* maka dibutuhkan visi yang menarik, realistis, dan ideal yang hendak dicapai oleh organisasi. Visi yang ditetapkan oleh KPKNL Surabaya sejalan dengan visi DJKN yaitu :

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Dalam menyatakan visi tersebut diharapkan seluruh pegawai dapat memahami dan menghayati sehingga mampu memotivasi kinerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.



Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Surabaya. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surabaya Tahun 2023, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU sebagai berikut:

1. **SS : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Terhadap Perekonomian Yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan**
 IKU : Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai sebesar 120%
 IKU : Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 120%
 IKU : Indeks Integritas tercapai sebesar 100,56%
2. **SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**
 IKU : Persentase Realisasi Pokok Lelang tercapai sebesar 120,00%
 IKU : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara tercapai sebesar 120,00%
3. **SS : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi**
 IKU : Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan tercapai sebesar 106,40%
4. **SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**
 IKU : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 120,00%
 IKU : Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan tercapai sebesar 101%
 IKU : Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tercapai sebesar 120,00%
5. **SS : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**
 IKU : Deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai sebesar 120,00%
 IKU : Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien sebesar 118,04%
6. **SS : Pengawasan Pengendalian Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif**
 IKU : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara tercapai sebesar 107,18%
7. **SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif**
 IKU : Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) tercapai sebesar 110,00%
 IKU : Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction tercapai sebesar 105,79%
 IKU : Persentase pelaksanaan permohonan lelang online tercapai sebesar 114,08%

8. SS : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120,00%

9. SS : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang Optimal

IKU : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 110,78%

IKU : Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN tercapai sebesar 120,00%

10. SS : Penguatan Pengawasan – Pengendalian internal yang efektif

IKU : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti tercapai sebesar 103,09%

IKU : Indeks Pengawasan dan Pengendalian tercapai sebesar 120%

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah diupayakan secara maksimal. Semua IKU berhasil melampaui target yang telah ditetapkan/diatas 100%, sehingga **NKO (Nilai Kinerja Organisasi) KPKNL Surabaya tahun 2023 mencapai 112,72% (status capaian hijau).**

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh KPKNL Surabaya dalam pencapaian target IKU persentase produktivitas lelang adalah mayoritas lelang TAP karena nilai limit yang ditentukan oleh Pemohon Lelang (umumnya pemohon lelang eksekusi UUHT) masih menggunakan nilai pasar. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah berkoordinasi dengan Pemohon Lelang serta mempercepat pelayanan permohonan lelang ulang, terutama untuk objek lelang yang nilai limitnya telah diturunkan oleh pemohon lelang karena nilai limit sebelumnya mendekati atau sama dengan nilai pasar.

Sedang permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah penyerapan anggaran belum optimal. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah memberikan himbauan kepada seluruh seksi/subbagian serta bidang tugas yang ada untuk segera melakukan kegiatan yang dalam rangka penyerapan anggaran pencapaian output.

Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2023, KPKNL Surabaya senantiasa berupaya untuk meningkatkan nilai capaian yang telah diperoleh dengan tetap bekerja keras dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan Kantor Pusat yang diarahkan dan ditetapkan. Selanjutnya, di masa yang akan datang diharapkan semua capaian sasaran strategis dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan lebih baik dari tahun 2023.

Daftar Isi

Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v

I

Pendahuluan

A. Latar Belakang	3
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
C. Peran Strategis KPKNL Surabaya	7
D. Sistematika Laporan	9

II

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis	13
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	16



III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi 23

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara
Dan Lelang terhadap Perekonomian yang
Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan 25

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa 29

Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 32

Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
yang Optimal 34

Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel
dan Profesional 38

Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan
Negara dan Lelang yang Efektif 41

Sasaran Strategis 7: Penerapan Tata Kelola Kekayaan
Negara dan Lelang yang Efektif 43

Sasaran Strategis 8: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja
Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif 45

Sasaran Strategis 11: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN
yang Optimal 47

Sasaran Strategis 11: Penguatan dan Pengawasan sistem pengendalian
Intenal yang efektif 50

B. Realisasi Anggaran 54

C. Capaian Kinerja Lainnya 55

IV

Penutup

Penutup

59

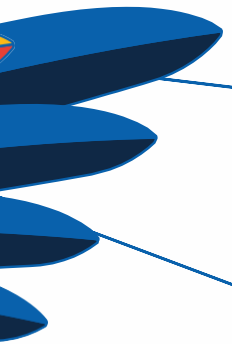
LAMPIRAN: Nilai Kinerja Organisasi 2023

Kontrak Kinerja Tahun 2023

BAB I | Pendahuluan



- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Sistematika Pelaporan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Surabaya dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I Lantai 5, Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya. KPKNL Surabaya merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal

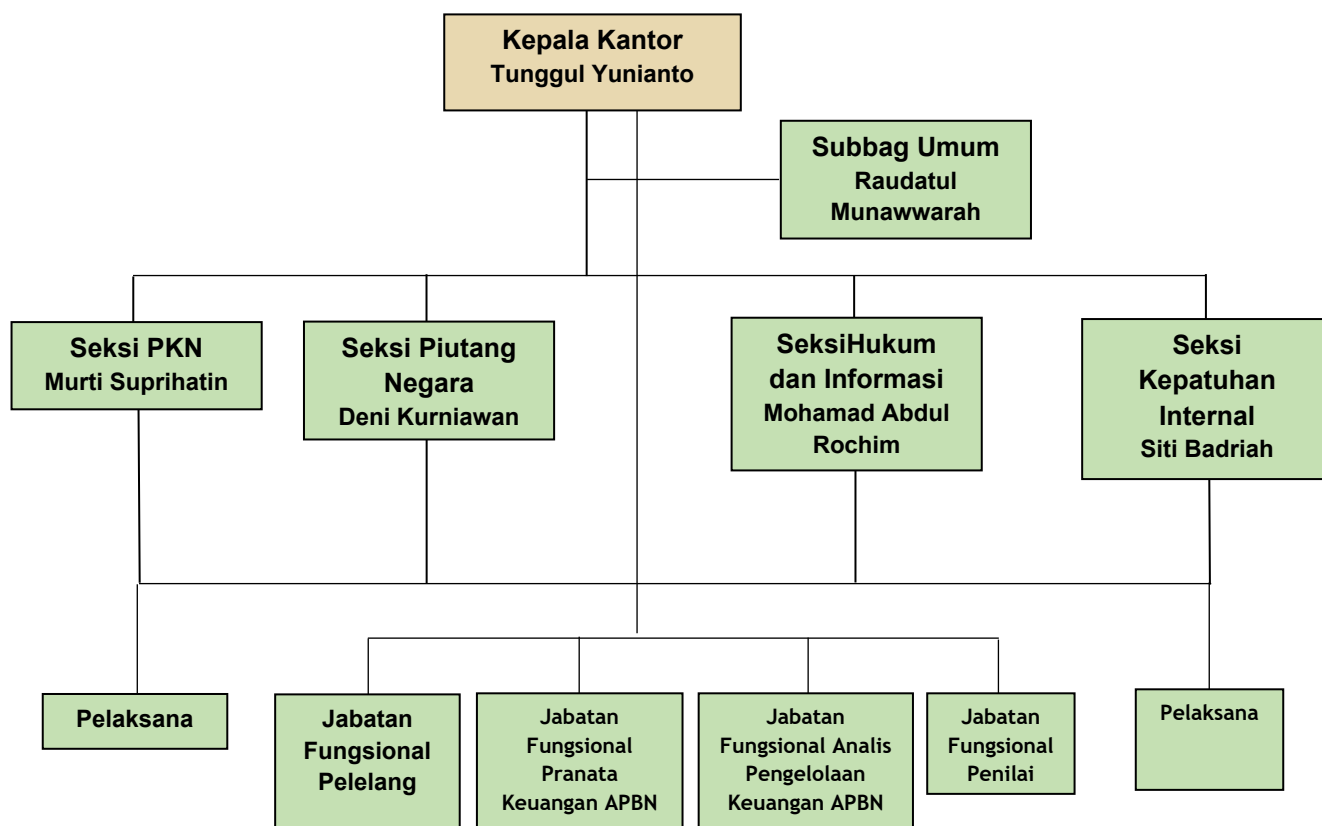
Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.

KPKNL Surabaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, KPKNL Surabaya dibagi dalam struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN);
- c. Seksi Piutang Negara ;
- d. Seksi Hukum dan Informasi (HI);
- e. Seksi Kepatuhan Internal (KI); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi **KPKNL Surabaya** dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini:

Diagram 1.1
Struktur Organisasi KPKNL Surabaya



Wilayah kerja KPKNL Surabaya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi :

1. Kota Surabaya;

2. Kabupaten Gresik;
3. Kabupaten Lamongan; dan
4. Kabupaten Tuban.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Surabaya didukung oleh 46 orang pegawai yang terbagi atas 6 pejabat struktural, 9 pejabat fungsional pelepas, 5 pejabat fungsional penilai, 2 pejabat fungsional pranata keuangan, dan 24 pelaksana. Komposisi pegawai KPKNL Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan tugas fungsional adalah sebagai berikut:

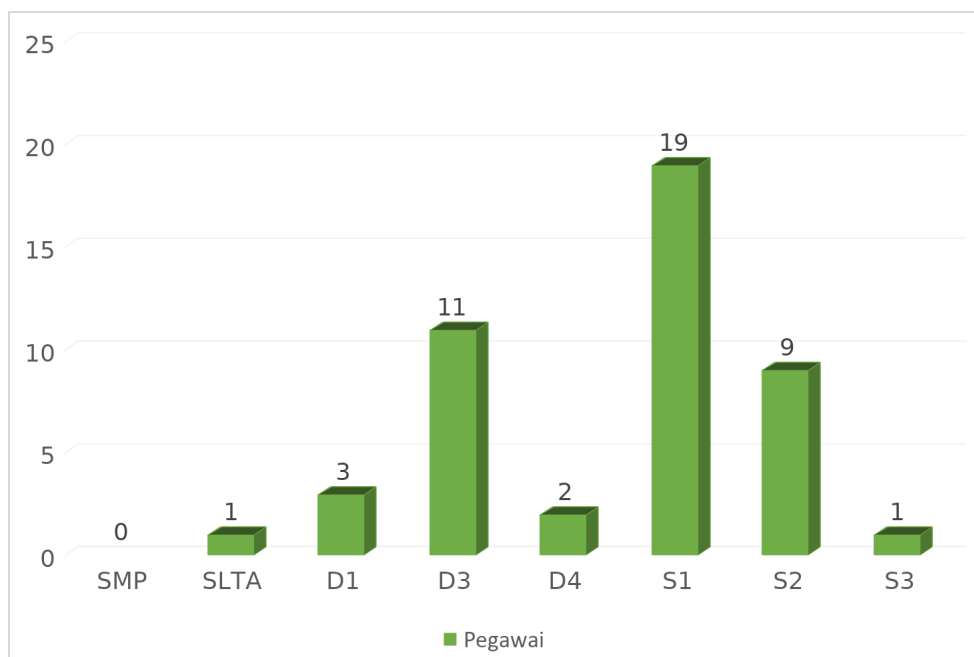
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

KPKNL	Tingkat Pendidikan									JUMLAH
	S3	S2	S1	D4	D3	DI	SLTA	SLTP	SD	
Surabaya	1	9	19	2	11	3	1	-	-	46
JUMLAH	1	9	19	2	11	3	1	-	-	46

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2023

Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Komposisi pegawai berdasarkan golongan secara tabel adalah sebagai berikut :

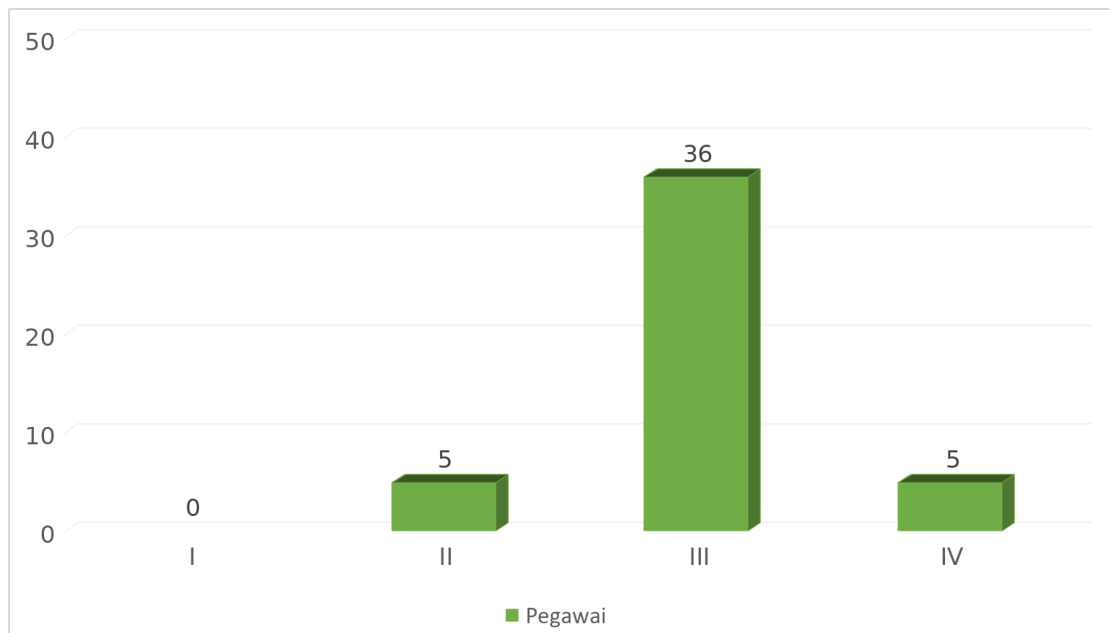
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

KPKNL	Rincian Per Golongan				
	IV	III	II	I	JUMLAH
Surabaya	5	36	5	-	46
JUMLAH	5	36	5	-	46

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2023

Komposisi pegawai berdasarkan golongan secara grafik dapat tersaji sebagai berikut:

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Komposisi pegawai berdasarkan tugas fungsional secara tabel dapat tersaji sebagai berikut :

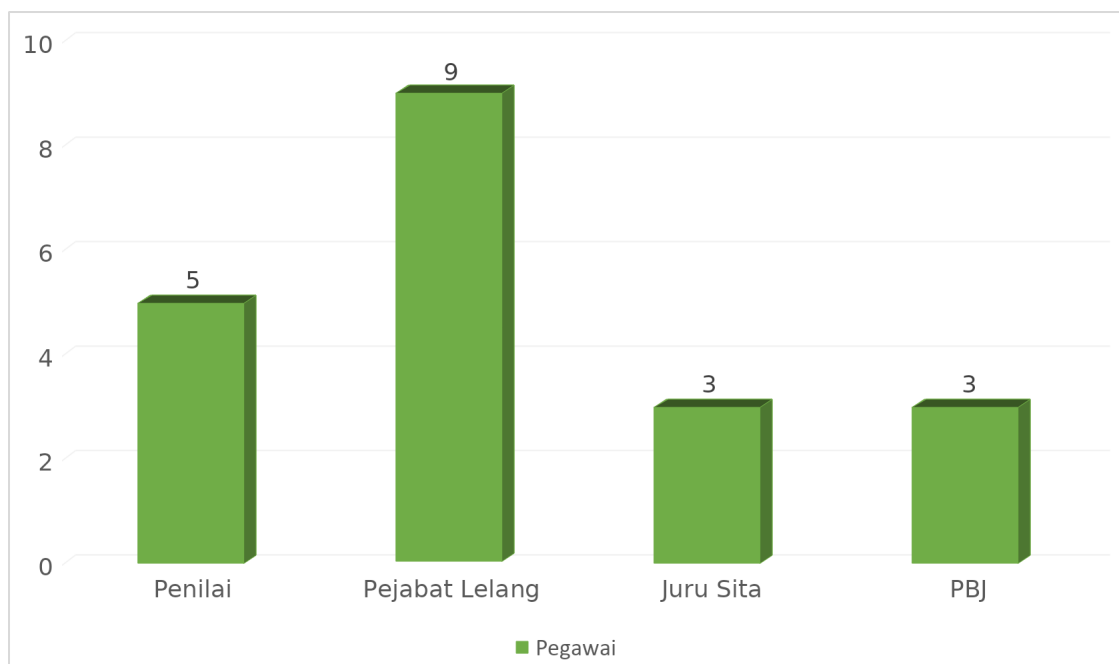
Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsional

KPKNL	Rincian Tugas Fungsional				
	Penilai	Pelelang	Juru sita	PBJ	JUMLAH
Surabaya	5	9	3	3	20

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2023

Komposisi pegawai berdasarkan tugas fungsional secara grafik sebagai berikut:

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsional



C. Peran Strategis KPKNL Surabaya

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, KPKNL Surabaya memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai Pengelola Barang Milik Negara, KPKNL Surabaya memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan antara lain:

1. optimalisasi penerimaan (*revenue center*), efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
2. optimalisasi pendayagunaan aset-aset yang terindikasi *idle* dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum; dan
3. berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Negara, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Surabaya senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Membangun dan meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Barang Milik Negara sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Surabaya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan barang milik negara, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang baik dan benar.

b. Optimalisasi Penataan Aset menuju *Revenue Center*

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi alternatif dalam menyokong APBN selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN *Idle* yang baik dan berdaya guna, KPKNL Surabaya sebagai pengelola dapat mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan aset *idle* sehingga paradigma *cost center* tidak dominan dan dapat bergeser ke arah *revenue center*.

c. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Surabaya bidang pengurusan piutang negara dalam rangka menyelamatkan keuangan Negara menjadi berkurang, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan ditindaklanjuti dengan PMK nomor 168/PMK.06/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal dari Penyerahan BUMN/BUMD dan Badan Usaha Yang Modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD.

Pengurusan Piutang Negara pada sekarang ini difokuskan pada pengelolaan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian/Lembaga saja.

d. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Surabaya secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara.

Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Surabaya diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah kerjanya.

Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-auction*). Diharapkan

pelaksanaan lelang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

e. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL Surabaya memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara.

Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Surabaya memperoleh hasil bea lelang (bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual) dan PNBP lelang lainnya termasuk bea lelang pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, secara tidak langsung, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Surabaya juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) dan persetujuan pemindahtanganan/penjualan barang milik negara.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja **KPKNL Surabaya** Tahun 2023 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan peran strategis instansi KPKNL Surabaya serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran KPKNL Surabaya tahun 2023.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya selama Tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diuraikan laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi

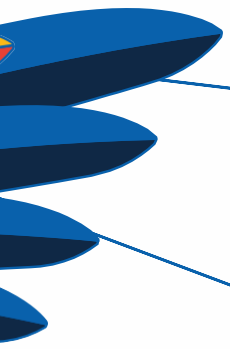
bahan monitoring dan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Surabaya di tahun yang akan datang.

BAB II | Perencanaan Kinerja



A. Perencanaan Strategis

B. Penetapan Kerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Perencanaan Strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Kementerian/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, KPKNL Surabaya tetap mengacu pada visi yang telah ditetapkan yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”***

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai tugas dan fungsi maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Surabaya merujuk pada tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode tahun 2020-2024 antara lain:

- a. peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
- b. optimalisasi pengurusan piutang negara;
- c. peningkatan pelayanan lelang serta;
- d. menjaga kesinambungan reformasi birokrasi, *good governance*, dan penguatan kelembagaan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, KPKNL Surabaya telah menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, yaitu: pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, pengamanan kekayaan negara yang akuntabel serta monitoring dan evaluasi yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pengurusan piutang negara, yaitu pengurusan piutang negara yang optimal dan peningkatan PNBPN dari pengurusan piutang negara.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang, yaitu pelayanan lelang yang optimal, peningkatan PNBPN dari pelayanan lelang dan pemanfaatan TIK yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, *good governance*, dan penguatan kelembagaan, yaitu SDM yang kompetitif, kepuasan pengguna layanan yang tinggi, pelayanan yang berkualitas, peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi serta monitoring dan evaluasi yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Surabaya. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi.

Strategi KPKNL Surabaya dalam upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Penyelesaian piutang negara yang mempunyai nilai *outstanding* besar atau *high profile*;
3. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara;

4. Penyelesaian aset properti BMN yang belum dilengkapi dengan dokumen peralihan;
5. Verifikasi fisik aset properti BMN dan pengurusan kelengkapan dokumen;
6. Standarisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal;
7. Pengembangan pedoman pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah;
8. Penjaminan kualitas dan pengembangan profesional berkelanjutan Penilai Pemerintah;
9. Pengembangan riset data dan informasi penilaian;
10. Pelayanan lelang yang optimal;
11. Peningkatan PNBP dari pelayanan lelang, piutang dan pengelolaan aset BMN;
12. Modernisasi lelang melalui *e-auction*;
13. Penguatan jabatan fungsional pelelang;
14. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang;
15. Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
16. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai;
17. Penyusunan Arsitektur TIK yang komprehensif;
18. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai *core business*;
19. Peningkatan efektifitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko;
20. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal;
21. Peningkatan efektifitas layanan kehumasan..

Penjabaran secara detil dari strategi yang akan dijalankan, diwujudkan dalam bentuk program kerja/kegiatan. dari programmerupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

KPKNL Surabaya melaksanakan “Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Pemberian Pelayanan Penilaian, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang”.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program (*outcome*), yaitu:

1. Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Terwujudnya Pelayanan Penilaian yang akuntabel
3. Tercapainya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan
4. Pelayanan lelang yang profesional, tertib, transparan dan akuntabel serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan, beberapa Indikator Kinerja kegiatan yaitu:

1. Nilai kekayaan negara yang diutilisasi
2. Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi (biad) pengurusan piutang Negara

3. Jumlah penerimaan negara dari bea lelang
4. Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan (PNDS)
5. Jumlah penerimaan dari pokok lelang.

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2023 dijabarkan dalam 10 Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui penetapan 20 target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. SS : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan

IKU : Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai sebesar 120%

IKU : Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 120%

IKU : Indeks Integritas tercapai sebesar 100,56%

2. SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

IKU : Persentase Realisasi Pokok Lelang tercapai sebesar 120,00%

IKU : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara tercapai sebesar 120,00%

3. SS : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

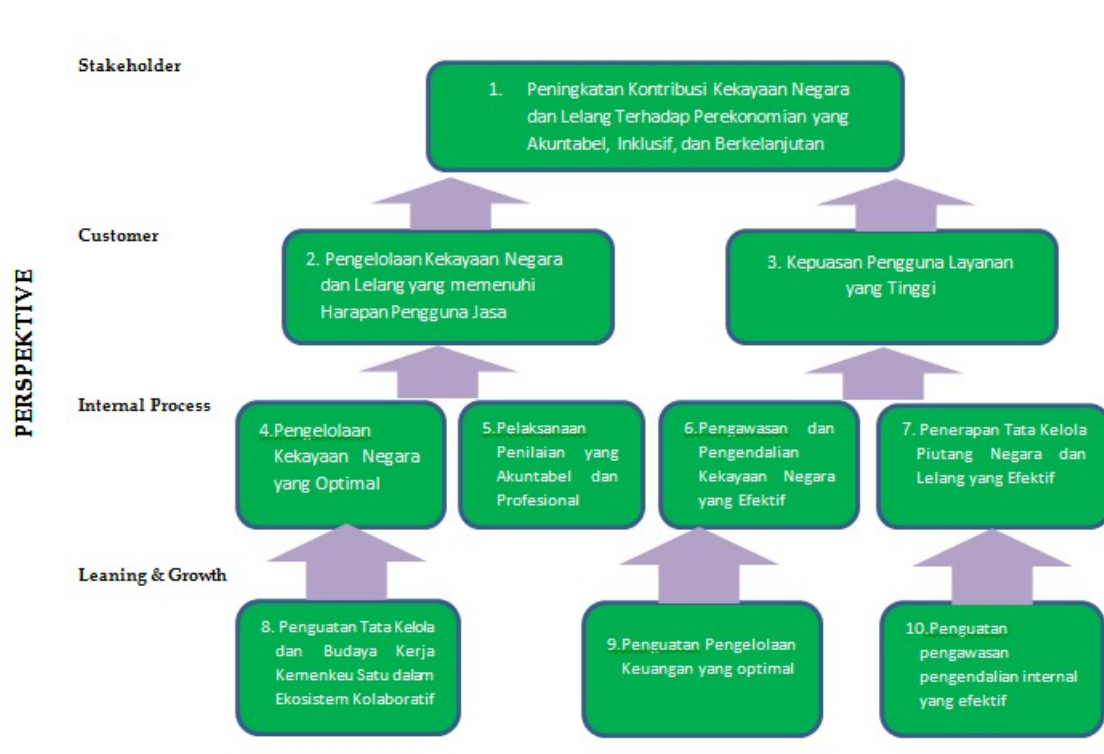
IKU : Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan tercapai sebesar 106,40%

4. SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

IKU : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 120,00%

- IKU : Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan tercapai sebesar 101%
- IKU : Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tercapai sebesar 120,00%
- 5. SS : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**
- IKU : Deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai sebesar 120,00%
- IKU : Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien sebesar 118,04%
- 6. SS : Pengawasan Pengendalian Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif**
- IKU : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara tercapai sebesar 107,18%
- 7. SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif**
- IKU : Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) tercapai sebesar 110,00%
- IKU : Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction tercapai sebesar 105,79%
- IKU : Persentase pelaksanaan permohonan lelang online tercapai sebesar 114,08%
- 8. SS : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif**
- IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120,00%
- 9. SS : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang Optimal**
- IKU : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 110,78%
- IKU : Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN tercapai sebesar 120,00%
- 10. SS : Penguatan Pengawasan – Pengendalian internal yang efektif**
- IKU : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti tercapai sebesar 103,09%
- IKU : Indeks Pengawasan dan Pengendalian tercapai sebesar 120%

PETA STRATEGI PETA STRATEGI KPKNL SURABAYA TAHUN 2023



Peta strategi KPKNL Surabaya mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi KPKNL Surabaya Tahun 2023 tersebut terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat dalam tabel berikut.

NILAI KINERJA ORGANISASI KPKNL SURABAYA TAHUN 2023

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2023	Keterangan
	<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan			
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	
1b-CP	Indeks Integritas	P/M	88,67%	

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2023	Keterangan
	<i>Customer Perspective (20%)</i>			
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	E/M	100%	
	<i>Internal Process Perspective (25%)</i>			
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68%	
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	P/L	100%	
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	
5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	E/M	70	
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			
6a-N	Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	
7	Pengawasan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif			
7a-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	
7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94%	
7c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	P/H	86%	
	<i>Learning & Growth Perspective (30%)</i>			
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif			
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang Optimal			

9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100%	
9b-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	15%	
10	Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif			
10a-N	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	P/M	97%	
10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	P/M	60	

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, KPKNL Surabaya berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 300/MK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian yang Kekayaan Negara yang Efektif

Sasaran Strategis 7: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Sasaran Strategis 8: Penguatan Tata Kelola Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem yang Kolaboratif

Sasaran Strategi 9: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang Optimal

Sasaran Strategi 10: Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

B. Realisasi Anggaran

C. Capaian Kinerja Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh hasil akhir capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Surabaya Tahun 2023 sebesar **112,72% (seratus dua belas koma tujuh dua empat persen)**.

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2023 KPKNL Surabaya telah menetapkan 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan dibawah ini.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Hasil pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada KPKNL Surabaya tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TAHUN 2023
KPKNL SURABAYA

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>					34,76%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan					115,87%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	155,49%	155,49%	120%	Hijau
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80%	124,45%	155,56%	120%	Hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88,67	89,17	100,56%	100,56%	Hijau
	<i>Customer Perspective (20%)</i>					22,64%	

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					120,00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	117,91%	117,91%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	175,65%	175,65%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi					106,40%	
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	100%	106,40%	106,40%	106,40%	hijau
	<i>Internal Process Perspective (25%)</i>					27,53%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					113,06%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	68%	82,42%	121,21%	120,00%	Hijau
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	P/L	100%	101,00%	101,00%	101,00%	Hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	121,60%	121,36%	120,00%	Hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					118,83%	
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	25%	0,37%	198,52%	120%	Hijau
5a-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70	82,63	118,04%	118,04%	Hijau
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif					107,18%	
6a-N	Persentase Tundak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	P/M	86%	92,18%	107,18%	107,18%	hijau
7	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif					110,56%	
7a-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	110,00%	110,00%	110,00%	Hijau
7b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction	P/M	94%	99,44%	105,79%	105,79%	Hijau
7c-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	P/M	86,00	98,11	114,08%	114,08%	Hijau
	<i>Learning & Growth Perspective (25%)</i>					28,91%	
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif					100,84%	
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	120,00%	hijau
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal					115,39%	
9a-CP	Indeks Kineja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100%	110,78%	110,78%	107,78%	kuning

9b-CP	Deviasi Data PNB Fungsional DJKN	P/M	15%	0,06%	199,60%	120,00%	hijau
10	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif					111,55%	
10a-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	P/M	97,00%	100,00%	103,09%	103,09%	hijau
10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	P/M	60,00	87,10	145,17%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						112,72%	hijau

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) yang terinci dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian IKU dan kegagalan capaian IKU dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang berhasil dicapai.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan

Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu *Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang*, *Persentase Produktivitas Lelang*, dan *Indeks Pelaksanaan Integritas* yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	155,49%	120,00%
2. Persentase Produktivitas Lelang	36%	20,95%	120,00%
3. Indeks Pelaksanaan Integritas	88,67%	89,17%	100,56%

a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1a-CP)

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari: 1). PNBPN BMN Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara) b. pemanfaatan barang milik negara; dan c. pemindahtanganan barang milik negara, yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara. 2). PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN) Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. 3). PNBPN Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa: a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian b. bea lelang batal atas permintaan penjual, c. biaya permohonan lelang, d. uang jaminan pembeli wanprestasi, e. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Formula dari IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dibagi Target Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dikali dengan 100%. Tujuannya adalah mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Target Penerimaan Negara pada KPKNL Surabaya tahun 2023 sebesar Rp109.548.400.000 yang terdiri dari PNBPN Aset sebesar Rp56.000.000.000, PNBPN PN sebesar Rp50.000.000 dan PNBPN Lelang sebesar Rp53.498.400.000. Sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 155,49% sejumlah Rp170.335.292.880, yang berasal dari:

a. Realisasi PNBPN Aset : Rp87.735.457.143 (156,47%)

- b. Realisasi PNBP PN : Rp47.874.946 (95,75%)
- c. Realisasi PNBP Lelang : Rp82.551.960.791 (154,31%)

Rincian realisasi Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dapat dilihat selengkapnya dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

KPKNL Surabaya	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/
Realisasi	47,58%	74,36%	74,36%	104,28%	104,28%	155,49%	155,49%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL Surabaya dalam mencapai IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang mengalami kendala-kendala sebagai berikut :

- PNBP Aset : terdapat penyewa yang mengajukan sewa dengan keringanan akibat pandemi covid;
- PNBP PN : piutang negara tidak didukung barang jaminan dan jika pun ada barang jaminannya tidak bernilai ekonomis serta terdapat masalah, penanggung hutang tidak diketahui keberadaanya, dan kondisi ekonomi penanggung hutang yang tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan utang;
- PNBP Lelang : objek lelang yang nilainya masih berada jauh di atas harga pasar menyebabkan kurangnya minat pembeli lelang, terdapat pembatalan lelang yang disebabkan oleh permohonan dari Pemohon Lelang atau terjadi penyelesaian diluar lelang, dan tidak terbitnya SKPT.

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU tersebut adalah:

- Untuk PNBP Aset, dengan memberikan persetujuan perubahan nilai sewa;
- Untuk PNBP PN, dengan melakukan penyampaian Surat Paksa dan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang serta melakukan pemberitahuan *crash program* keringanan hutang kepada debitur.
- Untuk PNBP Lelang, dengan mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui aplikasi permohonan lelang *online*, berpartisipasi secara aktif

memasarkan objek lelang, berkoordinasi dengan pemohon lelang, serta mempercepat proses lelang ulang terutama yang nilai limitnya telah diturunkan.

b. IKU Persentase Produktivitas Lelang (1b-CP)

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Realisasi jumlah frekuensi lelang yang laku pada KPKNL Surabaya tahun 2023 sebesar 2807 (98%) dari 2862 lot lelang secara keseluruhan. Target tahun 2023 adalah 80%.

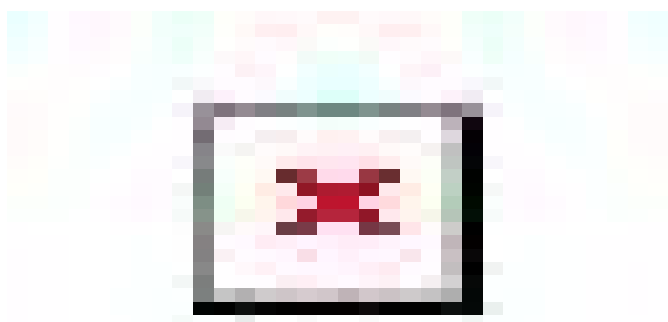
Tabel 3.4
Persentase Produktivitas Lelang

KPKNL Surabaya	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	59,82%	78,94%	78,94%	100,09%	100,09%	124,45%	124,45%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.5
Perbandingan Persentase Produktivitas Lelang

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2020	34%	22,94%	67,47%
2021	35%	30,48%	87%
2022	36%	20,95%	58,21
2023	80%	124%	120%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 3.1
Perbandingan Persentase Produktivitas Lelang

IKU Persentase Produktivitas Lelang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2023 karena sebagian besar dari hasil lelang yang telah dilaksanakan adalah laku. Hal tersebut disebabkan oleh nilai limit yang ditetapkan pemohon lelang dalam hal ini lelang eksekusi UUHT menggunakan nilai pasar.

Tindakan yang telah dilakukan oleh KPKNL Surabaya dalam mencapai IKU ini adalah berkoordinasi dengan pemohon lelang dan mempercepat pelayanan permohonan lelang ulang, terutama lelang yang nilai limitnya telah diturunkan oleh pemohon lelang, dimana nilai limit sebelumnya menggunakan nilai pasar.

Action plan yang dilakukan untuk meningkatkan IKU Persentase Produktivitas Lelang adalah mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui aplikasi permohonan lelang *online*, mempercepat proses tayang pengumuman lelang di website, memperpanjang waktu penayangan lot lelang dalam artian memperpanjang jarak pengumuman lelang kedua ke tanggal pelaksanaan lelang, menyebarluaskan informasi lelang melalui media sosial resmi KPKNL Surabaya.

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu *Persentase Realisasi Pokok Lelang* dan *Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara* yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6
Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	177,91%	120,%
2.	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	176,65%	120%

a. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (2a-CP)

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Tujuannya adalah supaya lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Surabaya tahun 2023 sebesar Rp1.212.300.000.000 yang terdiri dari pokok lelang PL I sebesar Rp1.043.250.000.000 dan pokok lelang pegadaian sebesar Rp169.050.000.000. Dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.156.770.141.026 atau 177,91% dengan rincian pokok lelang PL I sebesar Rp1.928.431.304.726 dan pokok lelang pegadaian Rp228.338.836.300 dengan capaian 120%.

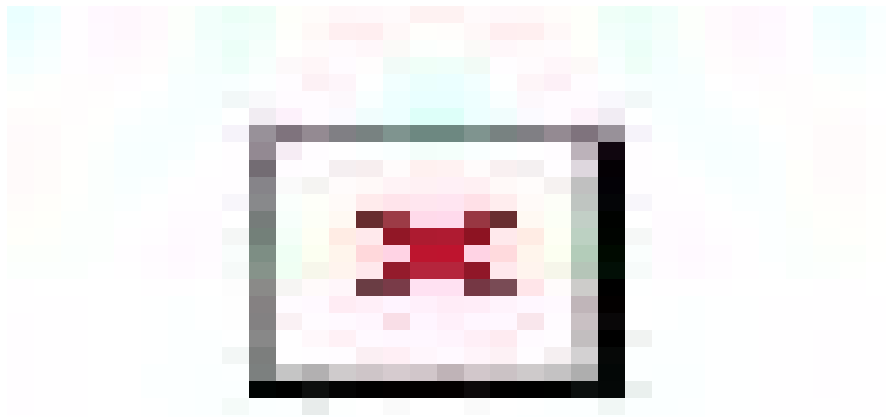
Tabel 3.7
Persentase Realisasi Pokok Lelang

KPKNL Surabaya	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	44,56%	71,83%	71,83%	84,06%	84,06%	177,91%	177,91%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.8
Perbandingan Jumlah Pokok Lelang Tahun 2018 s.d 2022

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	1.001.086.990.000,00	1.268.250.491.981,00	126,69%
2020	1.261.867.000.000,00	978.563.488.418,00	77,55%
2021	1.077.000.000.000,00	1.391.692.230.408,00	129,22%
2022	1.126.000.000.000,00	1.340.936.761.455,00	119,09%
2023	1.182.300.000.000,00	2.156.770.141.026,00	177,91%

Data jumlah pokok lelang dari tahun 2019 s.d. 2023 dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik 3.2
Perbandingan Jumlah Pokok Lelang Tahun 2019 s.d 2023

Dalam mencapai IKU persentase Realisasi Pokok Lelang, KPKNL Surabaya juga mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah nilai limit objek lelang masih sama dengan harga pasar, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk mengikuti lelang serta adanya pembatalan lelang yang dilakukan Pejabat Lelang dikarenakan SKPT tidak terbit serta adanya permohonan pembatalan dari pemohon lelang yang disebabkan adanya penyelesaian/pelunasan diluar lelang.

Upaya yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam rangka pencapaian IKU persentase Realisasi Pokok Lelang adalah dengan mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui aplikasi permohonan lelang online, berperan serta aktif dalam memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan lelang kepada masyarakat luas, melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait objek lelang yang memiliki potensi laku untuk terjual, mengajukan usulan kepada Kantor Pusat dan BPN yang disampaikan pada waktu rapat terkait perbaikan sistem penerbitan SKPT online yang lebih praktis dengan persyaratan yang lebih sederhana.

b. IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (2b-CP)

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN dengan komponen: 1) PNDS/ Piutang Negara Dapat Disetor (angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun

sebelumnya yang belum tercatat), 5) Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, dan 6) Koreksi data (perbaikan/pencatatan nilai).

Target IKU Penurunan outstanding Piutang Negara KPKNL Surabaya tahun 2023 sebesar Rp3.350.000.000,00 Adapun realisasinya sebesar Rp5.884.401.548,83 atau 175,65%.

Tabel 3.9
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

KPKNL Surabaya	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	27,66%	53,28%	53,28%	97,99%	97,99%	175,65%	175,65%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah dengan menyampaikan surat paksa dan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang, serta melakukan pemberitahuan *crash program* keringanan hutang kepada debitur.

3. Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yaitu *Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL* yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.10
Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	100%	106,40%	120%

a. IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-CP)

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win). Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Target Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2023 sejumlah 100% dengan realisasi sebesar 106,40% atau sebesar 120%. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan telah dilaksanakan terhadap pengguna layanan seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Pelayanan Penilaian, dan Pelayanan Lelang. Dengan hasil tersebut dan juga dengan melihat hasil-hasil indeks tahun sebelumnya yang juga sudah di atas target maka KPKNL Surabaya akan berkomitmen untuk mempertahankan dan berusaha meningkatkan capaian tersebut dengan terus meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Tabel 3.11

Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

KPKNL Surabaya	Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi							
	3a-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	3%	7%	7%	11%	11%	40,67%	100%	Max/ Ave
Realisasi	5,11%	10,23%	10,23%	11,93%	11,93%	81,82%	106,40%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

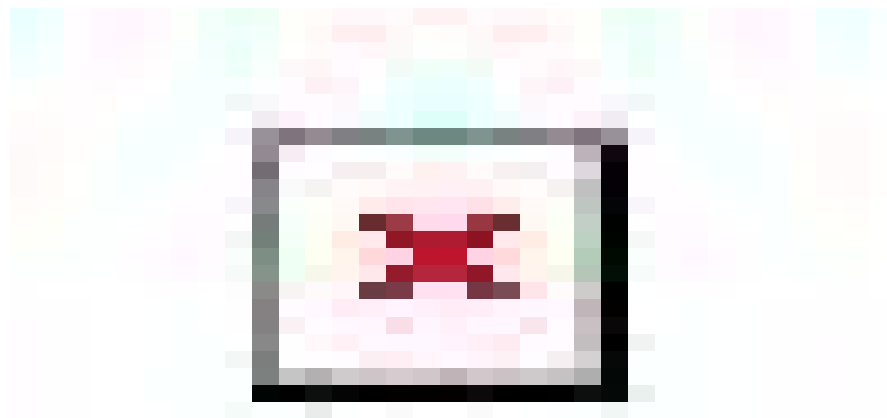
Penetapan target indeks kepuasan pengguna layanan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu tercapai. Hal ini menandakan semakin meningkatnya kepuasan pengguna layanan KPKNL Surabaya terhadap layanan yang diberikan stakeholder di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian, dan lelang.

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	4,59	4,90	106,75%
2020	4,60	4,74	103,04%
2021	4,60	4,90	120%
2022	4,61	4,76	103,90%
2023	100%	106,40	106,40%

Data indeks Kepuasan Pengguna Layanan dapat dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Grafik 3.3

Perbandingan capaian indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2019 s.d 2023

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks kepuasan pengguna layanan dimaksud, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi serta responsif atas pengaduan/keluhan dari pengguna jasa, mengintegrasikan standar prosedur layanan yang dilaksanakan oleh beberapa unit, dan membuat inovasi/terobosan pelayanan dengan tetap mengacu pada peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.

4. Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating). 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak

pembangunan aset bagi masyarakat. 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu *Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dan SBSK, Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan, Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara, dan Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio asset)* yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	82,42%	120%
2. Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan	100%	101,00%	101,00%
3. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	121,36%	120%

a. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara. Objek dari IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK adalah Tanah, Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara pada Satker Kementerian/Lembaga untuk wilayah KPKNL Surabaya.

Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 68% dengan realisasi sebesar 82,42% dengan capaian 120%.

Tabel 3.14
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

KPKNL Surabaya	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%	Max/ TLK
Realisasi	-	76,39%	76,39%	89,91%	89,91%	82.42%	82,42%	
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam mencapai target tersebut, tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya adalah melakukan koordinasi ke Satker dan melakukan bimbingan teknis pengisian form SBSK.

b. IKU Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan (4b-CP)

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah dengan tugas/kewajiban BPN, K/L dan DJKN.

Target bidang tanah BMN yang disertipikatkan tahun 2023 pada KPKNL Surabaya adalah 2105 bidang dan tercapai 2126 bidang atau sebesar 101%.

Tabel 3.15
Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan

KPKNL Surabaya	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi		17,53%	17,53%	27,74%	27,74%	101%	101%	
Capaian		43,83%	43,82%	46,24%	46,24%	101%	101%	

Permasalahan yang dihadapi KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah kurangnya akurasi data di satuan kerja pemohon sertifikasi, diantaranya karena adanya penggandaan bidang tanah yang signifikan serta satuan kerja tidak dapat menunjukkan titik pasti tanda batas atas bidang tanah yang diajukan sertifikasi.

Dalam menghadapi kendala tersebut, upaya yang telah dilakukan KPKNL Surabaya adalah melakukan koordinasi secara informal kepada satuan kerja, baik melalui telepon maupun pesan *whatsapp*, menyampaikan surat kepada satuan kerja, menghadiri rapat koordinasi pensertipikatan BMN yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2023, melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan setempat

c. IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (4c-CP)

IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan: BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Target IKU Persentase Penyelesaian BKPN tahun 2022 pada KPKNL Surabaya adalah 100% dengan jumlah 426 BKPN. Dan hal ini dapat terealisasi sejumlah 517 BKPN atau 121,36% dengan capaian 120%.

Tabel 3.16

Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

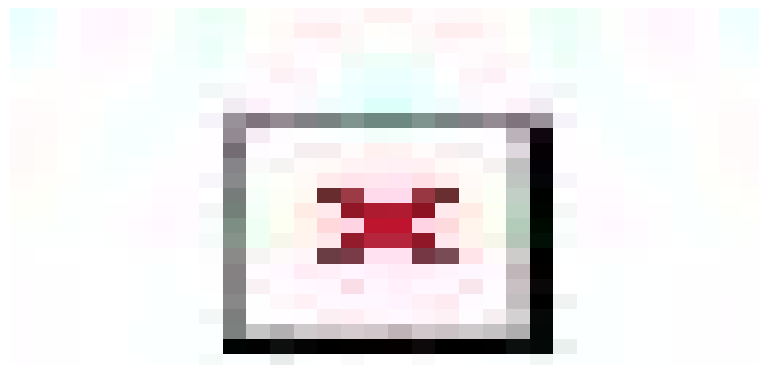
KPKNL	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
Surabaya	4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	25,12%	55,56%	55,56%	115,43%	115,43%	121,36%	121,36%	
Capaian	120%	111,11%	111,11%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.17

Perbandingan Persentase Penyelesaian BKPN

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2020	100%	122,27%	122,27%
2021	100%	100%	100%
2022	100%	121,60%	120%
2023	100%	121,36%	120%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut :



Grafik 3.4

Perbandingan Persentase Penyelesaian BKPN

Dalam mencapai IKU Persentase Penyelesaian BKPN, tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya adalah dengan meningkatkan tahap pengurusan sampai optimal dan melakukan pemberitahuan *crash program* keringanan utang kepada debitur.

Action plan yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini adalah dengan terus meningkatkan tahap pengurusan sampai optimal, melakukan penyampaian surat paksa dan melakukan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang, serta melaksanakan penelitian lapangan guna keperluan PSBDT.

4. Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan.

Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu (1) *Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian*; (2) *Rata-rata Indeks layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien*, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.18
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0,37%	120%
2. Rata-rata Indeks layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%	82,63%	118,04%

a. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (5a-CP)

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata

dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Target IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2023 sebesar 19%, dan realisasi sebesar 0,25% atau 198,68%.

Tabel 3.19
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

KPKNL Surabaya	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional 5a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	Max/
Realisasi	0,86%	0,52%	0,52%	0,32%	0,32%	0,25%	0,25%	Average
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Permasalahan yang dihadapi oleh KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah terdapat beberapa pengajuan nilai usulan permohonan pemanfaatan/ penghapusan dari pengguna barang yang terlalu tinggi dikarenakan hanya menggunakan harga taksiran, sehingga terdapat beberapa nilai wajar hasil perhitungan tim penilai di bawah nilai usulan permohonan penilaian, sehingga mengakibatkan deviasi antara nilai hasil penilaian dengan nilai hasil persetujuan.

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu melakukan edukasi kepada pengguna barang terkait besaran nilai usulan permohonan pemanfaatan/ penghapusan dan melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada pengguna barang dan seksi teknis terkait besaran nilai usulan permohonan.

Action plan atas IKU ini adalah dengan memberikan edukasi kepada pengguna barang terkait besaran nilai usulan permohonan pemanfaatan/penghapusan, serta melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada pengguna barang dan juga seksi Pengelolaan Kekayaan Negara terkait besaran nilai usulan permohonan.

b. IKU Rata-rata Indeks layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien (5b-N)

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan.

Target IKU Rata-rata Indeks layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien tahun 2023 sebesar 70%, dan realisasi sebesar 82,63% atau 118,04%.

Tabel 3.20**Rata-rata Indeks layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien**

KPKNL	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
Surabaya	5b-N Rata-rata Indeks layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/
Realisasi	91%	87,63%	87,63%	85,99%	85,99%	82,63%	82,63%	Average
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	118,04%	118,04%	

6. Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara Efektif

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter yaitu terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang, temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti, tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN, dan surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yaitu *Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara* yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.21

**Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Pengawasan dan
Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	92,19%	107,18%

a. IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara (6a-N)

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak

lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.

Capaian IKU ini dihitung dengan membandingkan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023.

Target tahun 2023 pada KPKNL Surabaya sebesar 85%, dan berhasil terealisasi sebesar 85,71% dengan capaian 100,84%.

Tabel 3.22

Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Barang Milik Negara

KPKNL Surabaya	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target		50%	50%	68%	68%	85%	85%	Max/ TLK
Realisasi		37,88%	37,88%	86,01%	86,01%	85,71%	85,71%	
Capaian		75,77%	75,77%	120%	120%	100,84%	100,84%	

Bahwa terkait dengan IKU ini, terdapat kendala yang dihadapi oleh yaitu satuan kerja belum melaporkan tindak lanjut pengelolaan BMN. Langkah yang telah diambil KPKNL Surabaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan berkoordinasi langsung dengan satuan kerja yang belum menyampaikan laporan pemanfaatan dan penjualan BMN. *Action plan* yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan satuan kerja yang belum menyampaikan laporan pemanfaatan dan penjualan BMN yang dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara di triwulan I tahun 2023

7. Sasaran Strategis 7: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu *Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)*, *Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction*, dan *Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online* yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.23
Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Penerapan
Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	110%	110%
2. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	99,44%	105,79%
3. Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	98,11%	114,08%

a. IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (7a-N)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Target tahun 2023, jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya 167 BMN dan jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker 2 BMN. Realisasi tahun 2023, jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya disampaikan rekomendasinya 167 BMN atau 100% dan jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker 3 BMN atau 150%.

Tabel 3.24

Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

KPKNL	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
Surabaya	7a-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	4%	32%	32%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	13,89%	34,49%	34,49%	79,88%	79,88%	110%	110%	
Capaian	120%	107,78%	107,78%	106,51%	106,51%	110%	110%	

Dalam pencapaian IKU ini tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya adalah berkoordinasi langsung dengan satuan kerja sekaligus melaksanakan survei lapangan terhadap BMN yang belum dilakukan survei. *Action plan* yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu tetap terus berkoordinasi dengan satuan kerjadan melaksanakan survei lapangan terhadap BMN yang belum dilakukan survei.

b. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction (7b-CP)

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi pelaksanaan lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang, serta E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Target capaian e-Auction dan e-Conventional Auction pada KPKNL Surabaya tahun 2023 adalah sebesar 94% dan berhasil terealisasi sebesar 99,44% atau 105,79%.

Tabel 3.25

Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction

KPKNL	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
Surabaya	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	

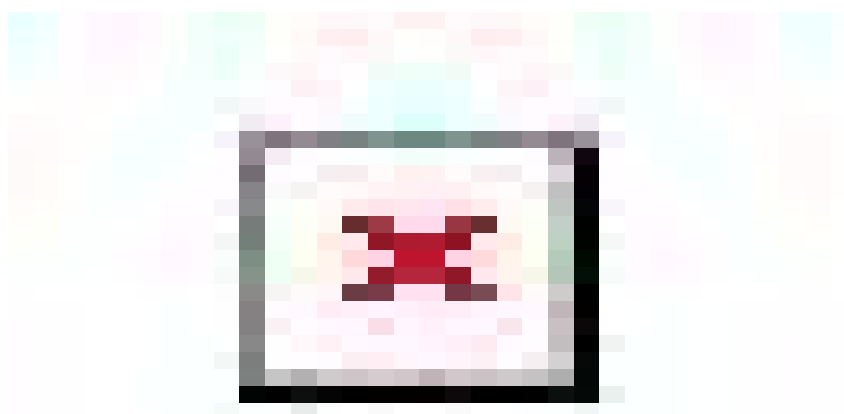
Realisasi	99,68%	99,69%	99,69%	99,70%	99,70%	99,44%	99,44%	Max/ TLK
Capaian	106,04%	106,05%	106,05%	106,07%	106,07%	105,79%	105,79%	

Tabel 3.24

Perbandingan Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2019	90%	99,89%	110,99%
2020	90%	99,64%	110,71%
2021	92%	99,62%	108,28%
2022	92%	98,85%	107,44%
2023	94%	99,44%	105,79%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut :



Grafik 3.5

Perbandingan Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

Implementasi IKU Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional masih didominasi lelang kayu perhutani sebagai lelang konvensional. *Action plan* KPKNL Surabaya dalam meningkatkan pencapaian IKU ini adalah menetapkan melaksanakan e-auction pada setiap permohonan lelang yang dilaksanakan di triwulan I tahun 2023 .

c. IKU Persentase Permohonan Lelang online (7b-CP)

Pengajuan permohonan lelang dilakukan secara online melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia. Pengguna aplikasi yang mengajukan permohonan lelang disebut sebagai pemohon lelang yang dapat memantau dan mengikuti secara online setiap tahapan dari permohonan yang telah diajukan sampai permohonan tersebut

telah disetujui oleh KPKNL. Pemohon lelang yang ingin mengajukan permohonan lelang harus memenuhi persyaratan utama yang harus dipenuhi seperti surat permohonan lelang, surat keputusan penunjukan penjual (surat kuasa), daftar barang yang akan dilelang, penetapan nilai limit, Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang dan foto objek lelang.

Target capaian Permohonan Lelang online pada KPKNL Surabaya tahun 2023 adalah sebesar 86% dan berhasil terealisasi sebesar 98,11% atau 114,08%.

Tabel 3.25

Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction

KPKNL	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
Surabaya	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	86%	86%	86%	86%	Max/ TLK
Realisasi	76,82%	99,05%	99,05%	98,08%	98,08%	98,11%	98,11%	
Capaian	120%	120%	120%	114,63%	114,63%	114,08%	114,08%	

8. Sasaran Strategis 8: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Program bersama Kemenkeu satu dalam penguatan kolaborasi, budaya dan sistem yaitu terdiri dari;

1. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan Refocusing Sinergi dan Integritas.
2. Pemanfaatan Teknologi dan Mindset Digital di seluruh sendi Organisasi;
3. Kolaborasi Pengelolaan Aset dan Efisiensi Tata Ruang Kantor;
4. Kolaborasi untuk Simplifikasi Pengelolaan Regulasi;
5. Penguatan Kolaborasi Pengelolaan Komunikasi;
6. Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Review Kinerja;
7. Simplifikasi Proses Bisnis dan Transformasi Organisasi.

Tabel 3.26

Capaian IKU Pada Sasaran Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	120%

a. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (8a-N),

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah bawahan yang akan pensiun di tahun 2023; bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2023; pegawai yang mutasi setelah 30 November 2023 tidak diperhitungkan di unit barunya; dan pegawai pada unit non-eselon.

Formula capaian IKU ini diperoleh dari capaian utama ditambah dengan capaian tambahan. Target tahun 2023 adalah 100% dan berhasil tercapai sebesar 120%.

Tabel 3.27

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

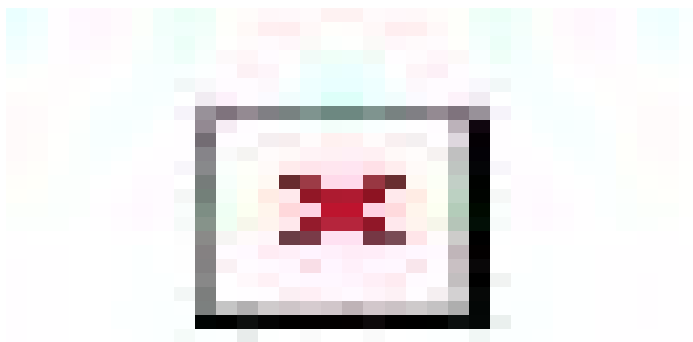
KPKNL	SDM yang Kompeten							
Surabaya	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	63,33%	63,33%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	18,67%	120%	120%	100%	100%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.28

Perbandingan Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	%
2019	87%	96%	110,56%
2020	100%	120%	120%
2021	100%	119,53%	119%
2022	100%	120%	120%
2023	100%	120%	120%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 3.6

Perbandingan persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2019 s.d 2023

Target IKU ini dapat tercapai dengan baik dikarenakan KPKNL Surabaya selalu mendorong dan memotivasi pegawai untuk mengikuti pelatihan, baik yang klasikal maupun non klasikal.

9. Sasaran Strategis 9: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu *Persentase Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN*, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.29

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	110,78%	110,78%
2. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0,06%	120%

a. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (9a-CP)

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Target tahun 2023 pada KPKNL Surabaya sebesar 100% dan realisasinya 110,78% atau dengan capaian 110,78%.

Tabel 3.30

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

KPKNL Surabaya	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	96,98%	94,16%	94,16%	94,80%	94,80%	110,78%	110,78%	
Capaian	101,55%	98,60%	98,60%	95,80%	95,80%	110,78%	110,78%	

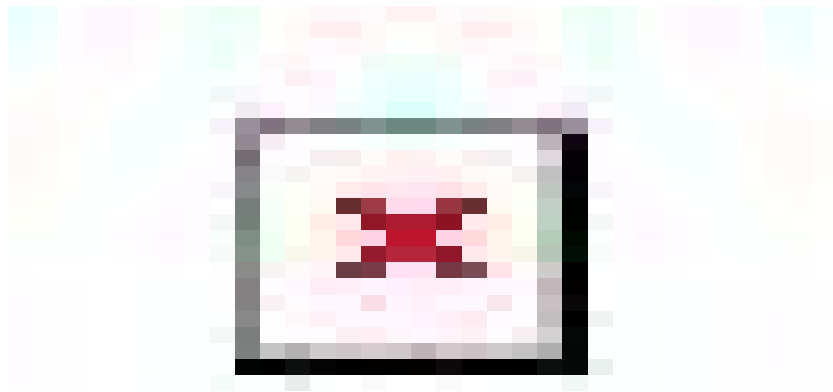
Perbandingan realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.31

Persentase Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2019	95%	96,72%	101,81%
2020	95%	96,41%	101,48%
2021	95,5%	95,41%	100,00%
2022	95,5%	94,62%	99,07%
2023	100%	110,78%	110,78%

Dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 3.7

Target dan Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Surabaya tahun 2023 dengan status capaian hijau dikarenakan penyerapan anggaran semakin optimal dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Tindakan yang telah dilaksanakan adalah dengan memberikan himbauan ke seluruh seksi/subbagian umum serta bidang tugas yang ada untuk segera melakukan kegiatan yang dalam rangka penyerapan anggaran maupun pencapaian output.

Action plan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan koordinasi antara subbag umum dengan seluruh seksi dalam hal identifikasi kegiatan yang perlu dilakukan dan penyusunan RPD secara tepat.

b. IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN (9b-CP)

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi, dan selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain khusus lelang dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBPN adalah 15%. Realisasi tahun 2023 pada KPKNL Surabaya adalah 0,06% dengan capaian 120%.

Tabel 3.32

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

KPKNL	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
Surabaya	6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0,06%	0,06%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Untuk meningkatkan capaian IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, KPKNL Surabaya melakukan upaya dengan cara melakukan penginputan seluruh transaksi pelaksanaan lelang pada dropbox dan melakukan penyetoran biad PPN ke kas negara maksimal 1 hari dari tanggal diterimanya setoran selanjutnya menginput biad berikut NTPN pada aplikasi FocusPN.

10. Sasaran Strategis 10: Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif melibatkan seluruh lapisan lini pengendalian internal yng selaras dengan tujuan organisasi.

Sasaran Srategis ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu *Persentase Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti* dan *Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif*. yang pencapaiannya masing-masing ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.33

**Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Penguatan
Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	97%	100,00%	103,09%
2. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	98,80	109,77%

a. IKU 1. Persentase Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti (10a-N)

Hasil Temun Pengawasan Itjen, dilakukan tindaklanjuti oleh seksi terkait dengan dukung dari Seksi Kepatuhan Internal dan dilakukan review oleh Kepala Kantor. Penanganan tindak lanjut Pengawasan Itjen diinput dalam aplikasi Team Central.

Target tahun 2023 pada KPKNL Surabaya sebesar 97%, berhasil terealisasi sebesar 100% atau 103,09%.

Tabel 3.34

Persentase Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti

KPKNL Surabaya	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif							
	10a-N Persentase Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	35%	40%	40%	53%	53%	97%	97%	Max/ TLK
Realisasi	22,22%	50%	50%	59,72%	59,72%	100%	100%	
Capaian	63,49%	120%	120%	112,68%	112,68%	103,09%	103,09%	

b. IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif (10b-N)

Pengawasan dan Pengendalian yang efektif apabila hasil pemantauan pengendalian internal tidak terdapat temuan dan dinyatakan efektif.

Target tahun 2023 pada KPKNL Surabaya sebesar 60, berhasil terealisasi sebesar 87,10 atau 120%.

Tabel 3.36

Indeks Pengawasan Pengendalian yang Efektif

KPKNL Surabaya	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif							
	10b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target						60%	60%	Max/ TLK
Realisasi						87,10%	87,10%	
Capaian						120%	120%	

Dalam pencapaian IKU ini, KPKNL Surabaya tidak menemukan kendala dan kegiatan FGD Pejabat Administrator dilaksanakan secara tepat waktu.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

- a. KPKNL Surabaya yang telah berhasil predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) ditahun lalu, proses pembangunannya berlanjut sampai dengan tahun 2023 ini.
- b. Adapun inovasi yang telah dibuat KPKNL Surabaya dalam rangka memperkuat komitmen anti korupsi dan meningkatkan layanan kepada pengguna jasa tetap dilaksanakan sampai saat ini. Inovasi tersebut antara lain:

1. Buku tamu digital

Inovasi layanan ini berbasis google form dimana para pengguna jasa layanan yang mengunjungi KPKNL Surabaya diwajibkan untuk mengisi buku tamu digital sebelum memasuki APT. Pengguna jasa layanan dapat mengaksesnya dengan melalui portal layanan atau dengan memindai QR code.

2. Layanan SKPT online

Layanan SKPT online ini merupakan layanan pra lelang bagi pemohon lelang. Layanan ini memangkas waktu layanan yang sebelumnya dilayani oleh Kantor Pertanahan setempat. Layanan SKPT online ini dilakukan di tempat khusus yang dinamakan Pojok Wani dan dilayani oleh petugas khusus. Apabila data yang tervalidasi secara tepat, maka SKPT online ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit dengan biaya Rp.0.

3. Layanan Penerbitan Kode Billing Pembayaran BPHTB Online

Layanan ini juga dilayani di Pojok Wani sebagaimana layanan SKPT. Layanan ini membantu para pemenang lelang membayar BPHTB, tanpa datang ke kantor layanan BPHTB pemerintah daerah. Layanan ini sementara tersedia untuk pemerintah daerah yang telah menerapkan e-BPHTB yaitu Kota Surabaya, kab. Gresik dan Kab. Nganjuk.

4. Elektronik Form (*E-Form*) Permohonan Layanan Pasca Lelang

Penggunaan *e-form* merupakan solusi di masa pandemi. Dengan *e-form* ini permohonan pasca lelang dapat diakses secara mobile dan data yang telah terekam dapat akses oleh Bendahara Penerimaan dan Pelelang untuk mempersiapkan dokumen pasca lelang seperti kuitansi, validasi dan bukti setor PPh dan kutipan Risalah Lelang.

5. Survey kepuasan layanan digital

Setelah mendapatkan layanan, stakeholder dapat mengisi survey kepuasan pengguna layanan secara digital dengan mengakses link atau QR code yang tersedia di APT atau ruang konsultasi.

6. validasi PPh online

Layanan validasi PPh online ini dilakukan oleh Bendahara Penerimaan melalui laman DJP online menu e-PHTB. Layanan ini sangat membantu pemenang lelang karena mendapatkan layanan di KPKNL Surabaya tanpa harus datang ke KPP setempat.

7. pakta integritas layanan

Pakta integritas layanan merupakan salah satu komitmen anti korupsi KPKNL Surabaya yang ditandatangani oleh pemohon layanan dan pemberi layanan. Para pengguna jasa layanan seperti layanan pasca lelang selain mengisi form permohonan, juga menandatangani pakta integritas sebagai janji untuk tidak memberikan sesuatu kepada pemberi layanan (KPKNL Surabaya).

Inovasi Layanan SKPT online, penerbitan kode billing pembayaran BPHTB online dan elektronik form (*e-form*) permohonan layanan pasca lelang telah mendapatkan rekomendasi untuk direplikasi dalam memberikan layanan lelang sesuai dengan Nota Dinas Direktur Lelang Nomor ND-375/KN.7/2021 tanggal 30 Maret 2021. Adapun

KPKNL lainnya yang telah melakukan replikasi layanan adalah KPKNL Madiun, KPKNL Jember dan KPKNL Makasar.

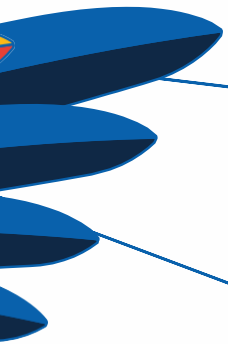
BAB IV | Penutup



A. Penutup

B. LAMPIRAN: Nilai Kinerja Organisasi 2023

Kontrak Kinerja Tahun 2023



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Surabaya ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Surabaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Penyusunan LAKIN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIN ini merupakan LAKIN tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024.

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja KPKNL Surabaya

Keberhasilan KPKNL Surabaya tergambar dalam pencapaian target IKU dengan status capaian HIJAU dengan **Nilai Kinerja Organisasi sebesar 112,72%**, sehingga tahun 2023 ini KPKNL Surabaya telah berhasil mencapai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa KPKNL Surabaya selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan manajemen kinerja yang baik dalam pencapaian target, pembangunan manajemen sumber daya manusia ataupun pelayanan kepada *stakeholder*.

B. Langkah Strategis Untuk Tahun Yang Akan Datang

Untuk tahun 2023 ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Surabaya berstatus hijau. Beberapa komponen dari IKU tersebut perlu ditingkatkan agar pencapaiannya lebih signifikan dari target yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi KPKNL Surabaya dalam rangka mendukung pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara antara lain:

- 1) penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel;
- 2) pengawasan dan pengendalian yang efektif;
- 3) laporan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel serta dapat dipakai dalam berbagai kepentingan;
- 4) Peningkatan kontribusi penerimaan PNB

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:

- 1) monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN dari perencanaan sampai dengan penghapusan;
 - 2) percepatan sertifikasi BMN berdasarkan *database* tanah BMN yang andal dan *reliable*;
 - 3) meningkatkan kualitas penyajian nilai BMN yang wajar di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
 - 4) Peningkatan kualitas SDM satker K/L melalui sosialisasi, *workshop*, *focus group discussion* dll;
 - 5) Melakukan pemetaan aset-aset BMN yang potensial dan strategis dalam rangka pemanfaatan aset BMN;
- b. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN adalah perencanaan kebutuhan BMN yang akuntabel.
- Adapun strategi yang untuk mewujudkannya adalah :
- 1) Menyiapkan *database* BMN yang lengkap, tertib dan *reliable*;
 - 2) Melaksanakan regulasi yang terkait dengan perencanaan kebutuhan BMN dengan baik dan terukur;
 - 3) Peningkatan kualitas SDM satker K/L melalui sosialisasi, *workshop*, *focus group discussion* dll;
- c. Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti adalah penerimaan pembiayaan dari aset *recovery* yang optimal.
- Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan pembiayaan dari aset *recovery* yang optimal antara lain:
- 1) penyelesaian Piutang Negara yang mempunyai nilai *outstanding* besar atau *high profile*;
 - 2) optimalisasi/ percepatan tahapan pengurusan Piutang Negara;
 - 3) verifikasi fisik aset properti yang telah diserahkan ke KPKNL dari Kantor Pusat DJKN
- d. Peningkatan Pelayanan Penilaian
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah:
- 1) Pengembangan Penilai yang profesional melalui diklat penilaian dan pelaksanaan *quality assurance* yang berkelanjutan;
 - 2) Penguatan jabatan fungsional Penilai;

- 3) *database* penilaian yang andal dan *reliable* serta dapat digunakan untuk berbagai kepentingan;

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- 1) pelaksanaan penilaian sesuai dengan standardan regulasi penilaian yang telah ditetapkan;
- 2) optimalisasi/ percepatan pelayanan penilaian;
- 3) peningkatan kualitas penilai internal melalui *knowledge sharing* dan *focus group discussion* serta pembinaan yang berkelanjutan dari Kanwil dan Kantor Pusat;

Disamping itu, KPKNL Surabaya akan menjalankan program kerja yang berkesinambungan yang substansinya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan edukasi kepada satker di wilayah kerja KPKNL Surabaya dalam hal menggunakan metode menilai/menaksir BMN peralatan dan mesin, sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran proses penghapusan BMN peralatan dan mesin;
2. Terus meningkatkan kompetensi penilai internal KPKNL Surabaya dengan menitikberatkan pengembangan kualitas SDM dan pembentukan *database* penilaian;
3. Koordinasi dan penggalian potensi penilaian kepada *stakeholder*;

e. Optimalisasi pengurusan piutang negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- 1) Pengurusan piutang negara yang optimal;
- 2) Peningkatan kontribusi penerimaan PNBPN;
- 3) Peningkatan pencapaian PNDS dan penyelesaian BKPN.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah :

- 1) kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN penyerahan dari Direktorat PKNSI;
- 2) optimalisasi/ percepatan tahapan pengurusan piutang negara;
- 3) pemanggilan debitor melalui media massa;
- 4) melakukan kunjungan dan penagihan langsung pada debitor yang potensial;
- 5) Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap BKPN yang telah optimal untuk ditingkatkan pengurusannya ke PSBDT, guna mengurangi outstanding BKPN dan nilai hutangnya.

f. Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- 1) Pelayanan lelang yang optimal;
- 2) Peningkatan PNBPN dari pelaksanaan lelang.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang adalah sebagai berikut :

- 1) sosialisasi mengenai penjualan lelang dan modernisasinya melalui *e-auction* dengan simulasi lelang, lelang expo, *press release* media massa dan kegiatan lainnya;
- 2) peningkatan kualitas SDM Pelelang/ Pejabat Lelang dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 3) penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang;

g. Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- 1) organisasi yang *fit for purpose*;
- 2) SDM yang kompetitif;
- 3) sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
- 4) peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- 1) restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
- 2) pengembangan pegawai yang baik dan berkelanjutan;
- 3) pelaksanaan Arsitektur TIK yang komprehensif;
- 4) pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai *core bussiness*;

h. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko;

- 1) optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal;
- 2) peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas pokok fungsi KPKNL Surabaya, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIN harus selalu menjadi

sebuah indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholder*, sehingga pada akhirnya KPKNL Surabaya dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan profesional. Terbukti tahun 2021 KPKNL Surabaya berhasil meraih predikat sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Keuangan yang berpredikat WBBM yang sampai saat ini masih berlanjut dengan mottonya “*KPKNL Surabaya sebagai Wilayah Amanah Berintegritas Cepat dan Akuntabel (WAN/CAK)*.”